

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Yamin, Muhammad. 2008. Abdul Rahim Lubis, Suriansyah.. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cet.Kesatu, Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta : Rajawali.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum pertanahan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Santoso, Urip. 2006. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana.
- Saleh, K. Wantjik. 1985. *Hak Anda atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1982. *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Boedi. 1990. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka
- Dillah, Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta
- Amirrudin., Zaenal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soemitro, Roni Hanitijio. 1990. *Metodelogi Penulisan hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Soepranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soekanto , Soerjono. 1990. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawal

Soekanto , Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Salim H. 2003. Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.

Harsono, Boedi. 1990. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

B. Undang-undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya.
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

6. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1999 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara
7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok
Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah
Konversi Hak-Hak Barat
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960
Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau
Kuasanya
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru
Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara
Penetapan Hak Guna Usaha.

C. Internet

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan> di akses 5 januari 2017

Alfa Rizki. *Metode Penelitian Deskriptif*. <http://alfaruq2010.blogspot.com>. diakses 7 Mei 2013

LAMPIRAN